



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU



Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



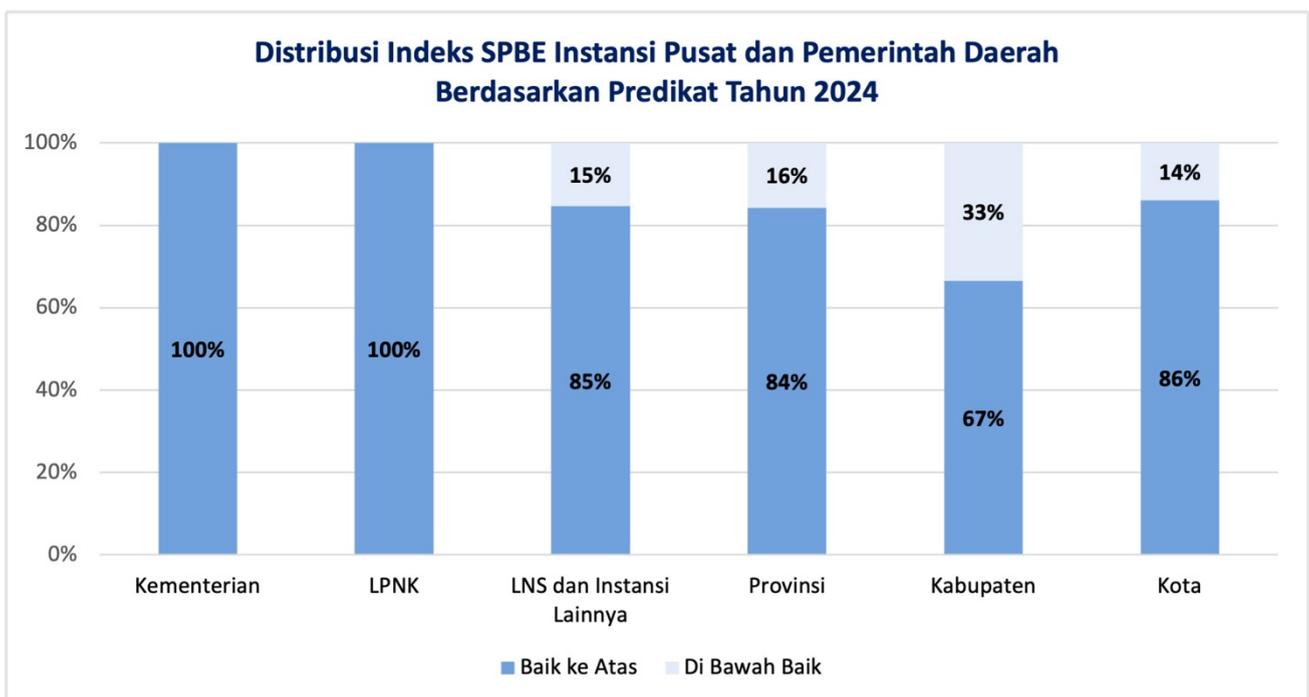
Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



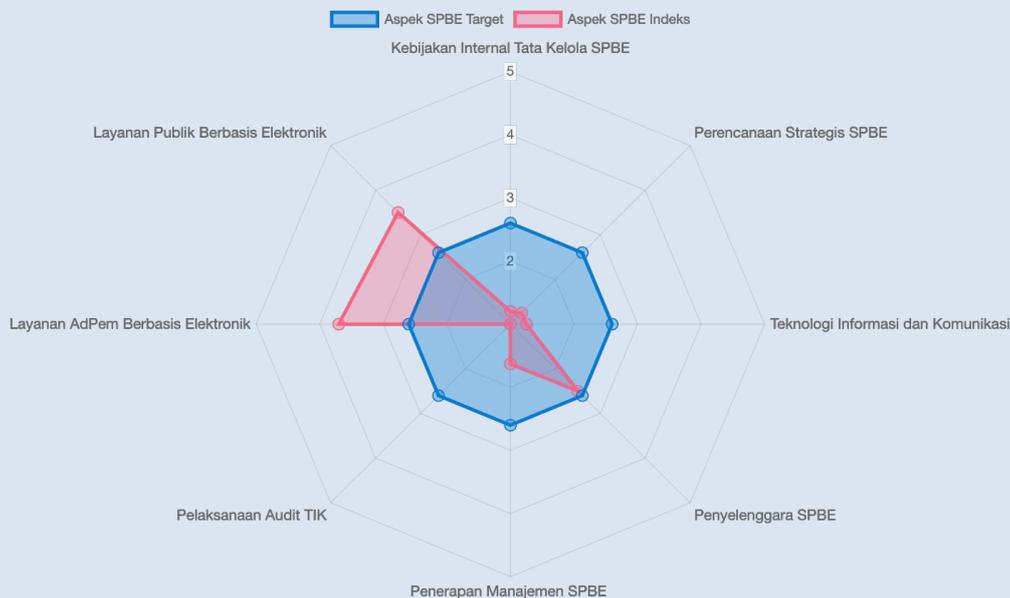
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																			
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang	*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																		
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																		
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																		
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																		
4	1,8 – < 2,6		Cukup																		
5	< 1,8		Kurang																		
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																				
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																				
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																				
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																				
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																				
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																				
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																				
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																				
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																				
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																				
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																				

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	2,42
Domain Kebijakan SPBE	1,20
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	<i>1,20</i>
Domain Tata Kelola SPBE	1,50
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	<i>1,25</i>
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	<i>1,25</i>
<i>Penyelenggara SPBE</i>	<i>2,50</i>
Domain Manajemen SPBE	1,45
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	<i>1,63</i>
<i>Audit TIK</i>	<i>1,00</i>
Domain Layanan SPBE	3,62
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>3,70</i>
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	<i>3,50</i>

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Penerapan pada Aspek Kebijakan di Kabupaten Mamuju masih berada pada tingkat kematangan yang sangat rendah. Mayoritas indikator, seperti Kebijakan Arsitektur SPBE, Kebijakan Peta Rencana SPBE, dan Kebijakan Manajemen Data, berada pada Tingkat Kematangan 1. Hanya Kebijakan Tim Koordinasi SPBE yang mencapai Tingkat Kematangan 3, menunjukkan adanya upaya awal dalam pengelolaan kebijakan koordinasi SPBE.

- Kekuatan
Tidak ditemukan kekuatan signifikan pada Aspek Kebijakan, karena tidak ada indikator yang mencapai Tingkat Kematangan 4 atau 5.
- Kelemahan
Sebagian besar indikator pada Aspek Kebijakan berada pada Tingkat Kematangan 1, termasuk kebijakan strategis seperti Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan Manajemen Data. Hal ini menunjukkan kurangnya pengaturan kebijakan internal yang terstruktur dan komprehensif untuk mendukung penerapan SPBE.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Pada Aspek Perencanaan Strategis, tingkat kematangan sebagian besar indikator masih sangat rendah. Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE berada pada Tingkat Kematangan 1, menunjukkan bahwa dokumen-dokumen penting yang seharusnya menjadi pedoman implementasi SPBE belum disusun secara formal. Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE berada pada Tingkat Kematangan 2, menunjukkan adanya langkah awal dalam menyelaraskan rencana dan anggaran, tetapi pelaksanaannya belum terpadu dengan baik.

- Kekuatan
Tidak ditemukan kekuatan signifikan pada Aspek Perencanaan Strategis, karena tidak ada indikator yang mencapai Tingkat Kematangan 4 atau 5.
- Kelemahan
Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan bahwa dokumen perencanaan strategis seperti Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE belum disusun secara formal, sehingga tidak ada keterpaduan yang memadai dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Rendahnya tingkat kematangan pada Aspek Perencanaan Strategis mencerminkan kurangnya dokumen perencanaan formal yang sesuai dengan pedoman nasional. Hal ini menyebabkan implementasi SPBE berjalan tanpa arah yang jelas, sehingga sulit untuk menyelaraskan tujuan strategis dengan alokasi sumber daya. Tidak adanya keterpaduan antara rencana strategis dan anggaran juga mengakibatkan inefisiensi dalam pengelolaan program dan aktivitas SPBE.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada Aspek TIK, sebagian besar indikator, seperti Inovasi Proses Bisnis SPBE, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Jaringan Intra, dan Sistem Penghubung Layanan, masih berada pada Tingkat Kematangan 1. Hanya Layanan Pusat Data yang mencapai Tingkat Kematangan 2, yang menunjukkan adanya langkah awal dalam pengelolaan data, meskipun masih jauh dari optimal.

- Kekuatan
Tidak ditemukan kekuatan signifikan pada Aspek TIK, karena tidak ada indikator yang mencapai Tingkat Kematangan 4 atau 5.
- Kelemahan
Sebagian besar indikator pada Aspek TIK menunjukkan tingkat kematangan yang sangat rendah, mencerminkan kurangnya inovasi, integrasi, dan pengelolaan teknologi yang memadai untuk mendukung penerapan SPBE. Indikator seperti Inovasi Proses Bisnis SPBE dan Pembangunan Aplikasi SPBE menunjukkan bahwa belum ada upaya untuk mengembangkan sistem yang efisien dan inovatif. Kurangnya jaringan intra dan sistem penghubung layanan juga menghambat kolaborasi antarunit kerja, sementara Layanan Pusat Data yang berada pada Tingkat Kematangan 2 belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan integrasi data dan keamanan.

D. Penyelenggara SPBE

Pada Aspek Penyelenggara SPBE, Kolaborasi Penerapan SPBE mencapai Tingkat Kematangan 3, menunjukkan adanya dasar kolaborasi antara unit kerja meskipun masih terbatas. Sementara itu, Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE berada pada Tingkat Kematangan 2, mengindikasikan bahwa tim koordinasi belum memiliki peran strategis yang signifikan dalam pengelolaan SPBE.

- Kekuatan

Kolaborasi Penerapan SPBE menjadi kekuatan awal pada aspek ini, mencerminkan adanya upaya koordinasi yang lebih baik antarunit kerja.

- Kelemahan

Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE yang masih pada Tingkat Kematangan 2 menunjukkan bahwa fungsi tim koordinasi belum optimal, dengan kurangnya program kerja formal yang terarah. Kelemahan pada Aspek Penyelenggara SPBE meliputi kurangnya pelaksanaan program kerja formal oleh Tim Koordinasi SPBE. Hal ini mengakibatkan kurangnya arahan strategis dalam implementasi SPBE dan kolaborasi lintas instansi yang belum optimal. Kondisi ini berpotensi menghambat integrasi kebijakan dan pengelolaan SPBE secara menyeluruh.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Indikator pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE menunjukkan tingkat kematangan yang beragam. Beberapa indikator, seperti Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Keamanan Informasi, dan Manajemen Perubahan, berada pada Tingkat Kematangan 1. Sedangkan indikator seperti Penerapan Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, dan Kompetensi SDM berada pada Tingkat Kematangan 2.

- Kekuatan

Tidak ditemukan kekuatan signifikan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE.

- Kelemahan

Seluruh indikator dengan Tingkat Kematangan 1 menunjukkan belum adanya penerapan manajemen yang terarah, seperti pengelolaan risiko, keamanan informasi, dan pengelolaan perubahan. Rendahnya tingkat kematangan pada sebagian besar indikator mencerminkan kurangnya penerapan program manajemen yang terarah dan terencana. Ketiadaan manajemen risiko dan keamanan informasi yang efektif meningkatkan risiko terhadap keberlanjutan operasional. Selain itu, kurangnya pengelolaan data, aset TIK, dan kompetensi SDM menyebabkan rendahnya efisiensi dan produktivitas dalam penerapan SPBE.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Semua indikator pada Aspek Audit TIK, yaitu Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE, berada pada Tingkat Kematangan 1.

- Kekuatan

Tidak ditemukan kekuatan pada Aspek Audit TIK.

- Kelemahan

Ketiadaan pelaksanaan audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE menunjukkan tingginya risiko terhadap keandalan, keamanan, dan integritas sistem. Tidak adanya standar audit yang diikuti dapat menyebabkan kerentanan yang tidak terdeteksi, yang berpotensi menghambat keberlanjutan layanan berbasis elektronik.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Aspek Layanan Administrasi menunjukkan kinerja yang baik pada indikator seperti Layanan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Kearsipan Dinamis yang mencapai Tingkat Kematangan 4. Namun, Layanan Kinerja Pegawai dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berada pada Tingkat Kematangan 3, menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan.

- Kekuatan

Keunggulan pada Layanan Administrasi terlihat pada indikator yang mencapai Tingkat Kematangan 4, menunjukkan pengelolaan administrasi yang baik dan terintegrasi.

- Kelemahan

Meskipun banyak indikator yang menunjukkan kemajuan, Layanan Kinerja Pegawai dan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang berada pada Tingkat Kematangan 3 memerlukan peningkatan dalam hal interoperabilitas dan pemanfaatan teknologi untuk mengoptimalkan efektivitas.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pada Aspek Layanan Publik, sebagian besar indikator, seperti JDIH dan Layanan Publik Sektor, mencapai Tingkat Kematangan 4, menunjukkan pengelolaan yang cukup baik. Namun, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik masih berada pada Tingkat Kematangan 3, mencerminkan perlunya penguatan pada aspek responsivitas.

- Kekuatan

Keunggulan utama pada Aspek Layanan Publik terlihat pada indikator yang mencapai Tingkat Kematangan 4 seperti JDIH dan Layanan Publik Sektor, mencerminkan layanan publik yang sudah cukup terintegrasi dan responsif.

- Kelemahan

Tidak ada indikator menjadi kelemahan pada Aspek Layanan Publik. Namun, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang berada pada Tingkat Kematangan 3 dapat ditingkatkan,

terutama dalam hal integrasi dan responsivitas untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Selain itu, layanan berbasis elektronik lainnya harus terus direviu, diperbaiki dan diperkuat agar lebih efisien dan terintegrasi.

REKOMENDASI

Secara prinsip, Kabupaten Mamuju masih memerlukan perbaikan dalam implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE untuk meningkatkan tingkat kematangan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE, Kabupaten Mamuju memperoleh nilai total indeks SPBE sebesar 2,4185, yang termasuk dalam predikat cukup. Hasil ini mencerminkan bahwa penerapan SPBE sudah berjalan pada beberapa aspek tetapi masih memerlukan perhatian khusus, terutama pada aspek kebijakan dan manajemen, untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih baik.

Keunggulan penerapan SPBE di Kabupaten Mamuju terlihat pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (3,70) dan Layanan Publik Berbasis Elektronik (3,50). Kedua aspek ini menunjukkan pengelolaan layanan yang cukup baik dan terintegrasi. Layanan administrasi mencakup perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pengadaan barang dan jasa yang telah berjalan dengan efektif. Sementara itu, layanan publik menunjukkan kemajuan dalam penyediaan layanan seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta layanan publik sektor yang telah mencapai tingkat kematangan tinggi.

Namun, kelemahan utama terlihat pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE (1,20), Perencanaan Strategis SPBE (1,25), dan Pelaksanaan Audit TIK (1,00). Pada Aspek Kebijakan, rendahnya tingkat kematangan mencerminkan belum adanya kebijakan internal yang komprehensif untuk mengatur implementasi SPBE di seluruh unit kerja. Pada Aspek Perencanaan Strategis, belum tersusunnya dokumen seperti Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE mengakibatkan kurangnya panduan strategis dalam pelaksanaan SPBE. Selain itu, tidak adanya pelaksanaan audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan TIK yang terstandar menunjukkan kurangnya pengawasan terhadap tata kelola SPBE, yang dapat meningkatkan risiko terhadap keamanan dan keandalan sistem.

Kabupaten Mamuju perlu memperkuat kebijakan internal dengan memastikan bahwa kebijakan yang dirancang mencakup seluruh komponen dan domain SPBE secara terpadu. Untuk Aspek Perencanaan Strategis, penyusunan dokumen perencanaan harus segera dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pada Aspek Audit TIK, pelaksanaan audit harus dirancang dan dilaksanakan secara rutin dengan mengacu pada pedoman nasional dari BRIN dan BSSN.

Kabupaten Mamuju patut diapresiasi atas keberhasilannya dalam pengelolaan layanan administrasi dan layanan publik yang menunjukkan tingkat kematangan tinggi. Namun, perlu dilakukan langkah strategis untuk memperbaiki aspek yang lebih lemah.

Pada Aspek Kebijakan, perlu segera disusun kebijakan internal yang mencakup seluruh komponen SPBE, mulai dari domain, referensi, pengaturan, hingga proses yang sesuai dengan pedoman nasional. Kebijakan ini harus berlaku untuk seluruh unit kerja dan memastikan keterpaduan antarunit kerja untuk mendukung implementasi yang lebih terintegrasi.

Pada Aspek Perencanaan Strategis, penting untuk menyusun dokumen seperti Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini harus mencakup seluruh domain dan referensi yang relevan untuk memastikan keterpaduan dalam pelaksanaan rencana strategis dan penganggaran SPBE. Langkah ini akan menjadi dasar yang kuat untuk implementasi yang lebih terarah.

Pada Aspek TIK, perlu ada peningkatan pada pengelolaan infrastruktur teknologi, inovasi proses bisnis, dan integrasi sistem. Sistem seperti layanan jaringan intra dan sistem penghubung layanan harus dikembangkan untuk mendukung kolaborasi antarunit kerja secara efektif. Selain itu, inovasi proses bisnis SPBE harus didorong untuk menciptakan efisiensi operasional yang lebih baik.

Pada Aspek Audit, pelaksanaan audit TIK harus direncanakan secara sistematis dan rutin. Audit ini harus mencakup audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE sesuai pedoman dari BRIN dan BSSN. Selain itu, auditor eksternal bersertifikasi perlu dilibatkan untuk memastikan pelaksanaan audit yang independen dan kredibel. Setiap temuan audit juga harus ditindaklanjuti dengan program perbaikan yang konkret dan terencana.

Pada Aspek Manajemen, program seperti manajemen risiko, keamanan informasi, data, dan kompetensi SDM harus diterapkan dengan lebih terarah dan berkesinambungan. Penguatan kompetensi SDM melalui pelatihan yang sesuai dengan pedoman SPBE perlu menjadi prioritas untuk memastikan pelaksanaan yang lebih optimal.

Pada aspek layanan, pengembangan lebih lanjut pada layanan publik seperti sistem pengaduan publik dan layanan data terbuka perlu diupayakan agar lebih interaktif, transaksional, dan terhubung dengan layanan lainnya. Evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk memastikan semua layanan yang telah berjalan terus berkembang dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan langkah-langkah perbaikan ini, Kabupaten Mamuju diharapkan dapat meningkatkan tingkat kematangan SPBE secara signifikan dalam evaluasi mendatang.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	1
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	1
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024